

**PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PANGKALPINANG
DITINJAU DARI UNDANG –UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh :

Yuliansyah Purwanto
NIM. 4011211116
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PANGKALPINANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



Oleh :

Yuliansyah Purwanto
NIM. 4011211116
Program Kekhususan : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Yuliansyah Purwanto

NIM : 401.12.11.116

FAKULTAS : Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Keperdataan

JUDUL SKRIPSI :

**Peranan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Pangan
Olahan Tanpa Izin Edar Di Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunujuk, 14 Januari 2018

Penulis,



Yuliansyah Purwanto
Yuliansyah Purwanto

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PANGKALPINANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Skripsi

Oleh :


Yuliansyah Purwanto
NIM. 4011211116


Program Kekhususan : Keperdataan

Telah disetujui Oleh :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014


(Darwance, S.H., M.H.)
NP. 608816033

Mengetahui,
a.n. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung


(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Oleh:

Yuliansyah Purwanto
NIM. 4011211116
Program Kekhususan : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 20 Juli 2018
dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Ketua	: Syamsul Hadi, S.H., M.H. (NP. 606007014)	(.....)
Sekretaris	: Toni, S.H., M.H. (NP. 608010028)	(.....)
Anggota	: Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. (NP. 608410029)	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)
NP. 606007014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

”Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah S.W.T., apapun dan di manapun kita berada kepada Dialah tempat meminta dan memohon.”

PERSEMBAHAN :

Segala puji bagi Allah S.W.T., Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat ku selesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W., yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Bapak dan Mamak tercintaku (**SRI MAHARSI DAN URWANA**) yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan motivasi selama ini, semoga penulis dapat memberikan yang terbaik di kemudian hari.
- ❖ Adik-adikku tercinta (**ANATA DA SIMA DAN OVILIA DA SIFA**).
- ❖ Teman-teman seperjuanganku fakultas hukum Universitas Bangka Belitung dari tahun angkatan 2012 serta seluruh adik-adik tingkat jurusan ilmu hukum yang saya banggakan.
- ❖ Seluruh Mahasiswa KKN Desa Serdang maupun warga Desa Serdang yang memberikan pengalaman baru selama 35 hari dan akan selalu menjadi kenangan di hidup saya.
- ❖ Seluruh kader Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 yang saya banggakan.
- ❖ Almamater tercintaku Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Yuliansyah Purwanto
NIM. 4011211116

PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR DI KOTA PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018

Kata Kunci : Peranan, Balai Pengawas Obat dan Makanan, dan Pangan Olahan.

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Namun, dalam kenyataannya banyak produk pangan olahan yang tidak memiliki izin beredar bebas di pasaran. Adanya UUPK serta terdapatnya Balai POM sebagai lembaga pemerintahan *non* departemen bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dan standar mutu pangan dapat mengontrol peredaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di Kota Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan faktor-faktor yang menghambat pengawasan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan pendekatan perilaku (*behavioral approach*). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan, teori perundang-undangan dan teori paternalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pom dalam mengawasi peredaran pangan olahan dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme pengawasan yaitu, mekanisme pengawasan terhadap produsen atau pabrik pembuatan produk makanan (*pre market*) dan mekanisme pengawasan terhadap produk makanan yang telah beredar (*post Market*). Sedangkan faktor-faktor yang menghambat Balai POM dalam mengawasi peredaran pangan yang tidak memiliki izin edar adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal Balai POM adanya keterbatasan staf Balai POM di Pangkalpinang, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran pemerintah dan tidak adanya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan faktor eksternal adalah kurang ketatnya pengawasan oleh Balai POM, kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat itu sendiri.

ABSTRACT

Yuliansyah Purwanto
NIM. 4011211116

THE ROLES OF FOOD AND DRUG ADMINISTRATION ON THE DISTRIBUTION OF PROCESSED FOOD WITHOUT DISTRIBUTION AUTHORIZATION IN THE CITY OF PANGKALPINANG REVIEWED FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

Research Papers. Faculty of Law. 2018

Keywords: Roles, Food and Drug Administration, and Processed Food.

Processed food is food or beverage produced by certain methods or methods with or without additional ingredients. However, in reality many processed food products that do not have permission circulate freely in the market. The existence of UUPK and Food and Drugs Administration (FDA) as a non-departmental government institution has the duty to supervise the circulation of processed food that does not have distribution permits and food quality standards can be controlled. This study aims to determine the role of FDA on the circulation of processed food without distribution authorization in Pangkalpinang City in terms of Law Number 8 (eight) of 1999 on Consumer Protection (UUPK) and the factors that inhibit the supervision of FDA against the circulation of processed food that does not have a marketing authorization. This research is juridical-empirical with behavioral approach (behavioral approach). The theory used in this research is role theory, legal theory and paternalistic theory. The result of the research shows that the role of FDA in monitoring the circulation of processed food is done by 2 (two) mechanism of supervisor, that is, supervision mechanism to producer or factory of food product (pre market) and mechanism of supervision on food product that has been circulated (post Market). While the factors that hinder the FDA from overseeing the circulation of food that does not have a distribution permit are the internal factor and external factors. Internal Factors FDA, there are limited staff of FDA in Pangkalpinang, limited facilities and infrastructure, limited government budget and absence of the Agency for Consumer Dispute Settlement (AFCDS). While the external factor is the lack of strict supervision by the FDA, lack of socialization and ignorance of the community itself.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdu lillahi rabbil'alamin, segala puji bagi ALLAH S.W.T., yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan NABI MUHAMMAD S.A.W., yang merupakan nabi terakhir, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk Skripsi dengan judul: **“Peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin Edar di Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”** Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan, yang tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan dan kemajuan di masa mendatang serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, baik berupa ilmu pengetahuan, dukungan moril maupun materiil. Atas segala bantuan dan peran sertanya yang telah diberikannya kepada penulis, maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
6. Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah membantu mengarahkan penulis dalam menemukan ide-ide penulisan serta memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moril dan memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Mohamad Bagir, Apt., M.Sc., sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (Kasi Pemdik Serlik) di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang.
9. Bapak Zulkarnain, S.Si., Apt., sebagai Kepala Seksi Farmasi di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Ibu Dewi Indah Cahyanti, S.P., M.M., sebagai Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah bersedia memberikan waktu dan pemikiran sehingga membantu penulis dalam penelitian Skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan khususnya Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2012.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap para pembaca.

Balunijuk, 25 Juli 2018

Penulis,

Yuliansyah Purwanto

DAFTAR ISI

	hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretis	6
1. Teori Peranan.....	7
2. Teori Perundang-undangan.....	7
3. Teori Paternalistik.....	8
4. Balai Pengawas Obat dan Makanan	9
5. Peredaran Pangan Olahan	9
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan	10

F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan.....	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Pengolahan Data.....	16

BAB II PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN	17
A. Pengertian Tentang Peranan.....	17
B. Balai Pengawas Obat dan Makanan	18
1. Pengertian Balai Pengawas Obat dan Makanan	18
2. Visi dan Misi Balai POM di Pangkalpinang	20
3. Fungsi dan Tujuan Balai POM di Pangkalpinang	22
4. Unit Layanan Pengaduan Konsumen	24
5. Struktur Organisasi Balai POM di Pangkalpinang	25
C. Pangan Olahan.....	28
1. Pengertian Tentang Pangan	28
2. Jenis-Jenis Pangan	29
3. Larangan Peredaran Pangan Berbahaya	31
4. Pangan Olahan.....	32
5. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pangan Olahan.....	32
D. Perlindungan Konsumen	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	36

2. Bentuk Perlindungan Hukum	37
3. Pengertian Perlindungan Konsumen	38
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	39
7. Pengertian Konsumen.....	40

BAB III PERANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TERHADAP PEREDARAN PANGAN OLAHAN DI KOTA

PANGKALPINANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN **44**

A. Peranan Balai POM Terhadap Peredaran Pangan Olahan

Tanpa Izin Edar di Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen

44

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Balai POM Dalam

Mengawasi Peredaran Pangan Olahan Yang Tidak Memiliki

Izin Edar.....

59

BAB IV PENUTUP..... **68**

A. Kesimpulan.....

68

B. Saran.....

69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN